



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KELAS I B

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024 - *UNAUDITED*

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
(400371)



(0622) 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Simalungun adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Simalungun. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Simalungun, 24 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik

Ruben Harlen Panjaitan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	xi
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	15
V. Catatan atas Laporan Keuangan	19
A. Penjelasan	19
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Simalungun	19
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A.3. Basis Akuntansi	21
A.4. Dasar Pengukuran	21
A.5. Kebijakan Akuntansi	21
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	28
B.1. Pendapatan	28
B.2. Belanja	31
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
C.1. Aset Lancar	34
C.2. Aset Tetap	36
C.3. Aset Lainnya	36
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	36
C.5. Ekuitas	38
D. Penjelasan Atas Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
D.2. Beban Pegawai	39
D.3. Beban Persediaan	40
D.4. Beban Barang dan Jasa	40

D.5. Beban Pemeliharaan	42
D.6. Beban Perjalanan Dinas	42
D.7. Kegiatan Non Operasional	43
D.8. Pos Luar Biasa	44
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
E.1. Ekuitas Awal	45
E.2. Surplus (Defisit) LO	45
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	45
E.4. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	45
E.5. Transaksi Antar Ekuitas	46
E.6. Ekuitas Akhir	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	49
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	49
Lampiran dan Daftar	54



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Simalungun, 24 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik

Ruben Harlen Panjaitan

NIP. 198112232009041004

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun Periode Tahun 2024 - *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp65.956.618 atau mencapai 85,71% dari estimasi pendapatan sebesar Rp76.952.000 .

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp312.247.950 atau mencapai 99,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp312.500.000 .

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.041.900 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp0, dan nilai Ekuitas tersaji sebesar Rp2.041.900.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.956.618, sedangkan jumlah Beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp321.307.068, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp255.350.450). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0 dan Pos-Pos Luar Biasa senilai Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp255.350.450).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.868.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp255.350.450), kemudian dikurangi dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai Rp0, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp254.524.350, sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.041.900.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	76.952.000	65.956.618	(10.995.382)	85,71	127.670.708
Jumlah Pendapatan dan Hibah		76.952.000	65.956.618	(10.995.382)	85,71	127.670.708
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.2.2	312.500.000	312.247.950	(252.050)	99,92	337.698.500
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		312.500.000	312.247.950	(252.050)	99,92	337.698.500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Neraca

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024	2023
Aset			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	0
Persediaan	C.1.3	2.041.900	2.868.000
Jumlah Aset Lancar		2.041.900	2.868.000
Aset Tetap	C.2		
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3		
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		2.041.900	2.868.000
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0

Jumlah Kewajiban		0	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.5	2.041.900	2.868.000
Jumlah Ekuitas		2.041.900	2.868.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		2.041.900	2.868.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Laporan Operasional

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	65.956.618	127.670.708
Jumlah Pendapatan		65.956.618	127.670.708
Beban			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	140.398.618	177.325.599
Beban Barang dan Jasa	D.4	130.658.450	55.488.500
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	50.250.000	113.850.000
Jumlah Beban		321.307.068	346.664.099
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(255.350.450)	(218.993.391)
Kegiatan Non Operasional	D.7	0	0
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(255.350.450)	(218.993.391)
Pos Luar Biasa	D.13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(255.350.450)	(218.993.391)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Ekuitas

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024	2023
Ekuitas Awal	E.1	2.868.000	3.789.500
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(255.350.450)	(218.993.391)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3	0	0
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	254.524.350	218.071.891
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(826.100)	(921.500)
Ekuitas Akhir	E.6	2.041.900	2.868.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Simalungun

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, yang beralamat di Jalan Asahan Km. 4 Kabupaten Simalungun, diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu Bapak M. Roesli, S.H. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi **”Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”**.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri Simalungun bekerja dengan moto **“BERAKSI”**, yaitu **Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, dan Inovatif**. Selain itu Pengadilan Negeri Simalungun juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata;
 2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata;
 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA

- ✓ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ✓ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ✓ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- ✓ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ✓ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- ✓ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ✓ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- ✓ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ✓ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ✓ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ✓ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- ✓ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ✓ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ✓ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- ✓ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- ✓ Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- ✓ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - ii. piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- ✓ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- ✓ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ✓ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- ✓ Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ✓ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ✓ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- ✓ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- ✓ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- ✓ Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- ✓ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ✓ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- ✓ Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- ✓ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✓ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- ✓ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ✓ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ✓ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ✓ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- ✓ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- ✓ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✓ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✓ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Penjelasan atas Pos-Pos LRA

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp312.500.000. Selama tahun anggaran 2024, telah dilakukan revisi atas DIPA awal yang disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan PNB	76.952.000	76.952.000
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	76.952.000	76.952.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	312.500.000	312.500.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	312.500.000	312.500.000

B.1. Pendapatan

Realisasi

Pendapatan :

Rp65.956.618

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.956.618 dengan estimasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.952.000. Pendapatan Negara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	76.952.000	65.956.618	85,71
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Total Pendapatan	76.952.000	65.956.618	85,71

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp61.714.090 atau 48,34% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penyediaan layanan hukum dan peradilan pada Pengadilan, maupun pada PNBP yang diperoleh melalui jasa giro pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang digunakan sebagai penampung biaya perkara.

Perbandingan realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	65.956.618	127.670.708	(61.714.090)	(48,34)
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00
Total Pendapatan	65.956.618	127.670.708	(61.714.090)	(48,34)

B.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**Realisasi****Pendapatan PNB****Rp65.956.618**

Realisasi Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.956.618 dan Rp127.670.708. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB

(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	50.000	0	50.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	5.390.000	7.290.000	(1.900.000)	(26,06)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	17.440.000	19.620.000	(2.180.000)	(11,11)
4.	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	41.609.500	62.073.500	(20.464.000)	(32,97)
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.467.118	38.687.208	(37.220.090)	(96,21)
Total Pendapatan		65.956.618	127.670.708	(61.714.090)	(48,34)

Sehubungan dengan adanya PNB yang berasal dari jasa giro pada Rekening Pemerintah Lainnya, hal ini terjadi karena Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perubahan Rekening Penampung Biaya Perkara, semula pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi rekening pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan. Bank BTN mendukung layanan perbankan berbasis elektronik/e-banking yang mempermudah transaksi/pembayaran untuk biaya perkara, dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan e-Court serta e-Litigasi pada Pengadilan Negeri Simalungun. Pendapatan jasa giro senilai Rp1.467.118 tersebut diperoleh pada periode Juni 2024 dan telah disetorkan

seluruhnya ke kas negara serta telah dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja

Negara :

Rp312.247.950

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp312.247.950 atau sebesar 99,92% persen dari anggaran belanja senilai Rp312.500.000. Sampai dengan periode 31 Desember 2024 tidak terdapat pengembalian belanja. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	312.500.000	312.247.950	99,92
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	312.500.000	312.247.950	99,92
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Neto	312.500.000	312.247.950	99,92

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp25.450.550 atau sebesar 7,54% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Seluruh realisasi belanja negara tersebut merupakan belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00

Belanja Barang	312.247.950	337.698.500	(25.450.550)	(7,54)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	312.247.950	337.698.500	(25.450.550)	(7,54)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp0

DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Bagian Anggaran 005.03 Tahun Anggaran 2024 tidak memuat pagu Belanja Pegawai.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp312.247.950

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp312.247.950 dan Rp337.698.500.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.450.550 atau sebesar 7,54% dari realisasi per 31 Desember 2023. Terdapat penurunan pada bagu belanja barang untuk Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, dengan total realisasi pada akhir tahun baik pada tahun 2024 maupun 2023 telah mencapai lebih dari 99%. Dengan demikian, belanja barang pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun bagian anggaran 005.03 telah dioptimalkan kinerja pelaksanaan anggarannya demi mendukung kelancaran proses perkara pidana perorangan di tingkat pertama, baik dari segi penyerapan anggaran maupun progres capaian serta realisasi volume rincian output.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	24.319.160	12.348.500	11.970.660	96,94
Belanja Barang Non Operasional	70.339.290	11.940.000	58.399.290	489,11
Belanja Barang Persediaan	131.339.500	168.360.000	(37.020.500)	(21,99)
Belanja Jasa	36.000.000	31.200.000	4.800.000	15,38

Belanja Perjalanan Dinas	50.250.000	113.850.000	(63.600.000)	(55,86)
Total Belanja Bruto	312.247.950	337.698.500	(25.450.550)	(7,54)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Neto	312.247.950	337.698.500	(25.450.550)	(7,54)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal : Rp0*

DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Bagian Anggaran 005.03 Tahun Anggaran 2024 tidak memuat pagu Belanja Modal.

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar :
Rp2.041.900

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.041.900 dan Rp2.868.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lancar

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	2.041.900	2.868.000
Total Aset Lancar	2.041.900	2.868.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Persediaan RM	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

**Kas Lainnya dan
Setara Kas : Rp0**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

**Persediaan :
Rp2.041.900**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.041.900 dan Rp2.868.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	2.041.900	2.868.000
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	2.041.900	2.868.000

Barang Konsumsi per 31 Desember 2024 tersebut merupakan alat tulis kantor yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Simalungun.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp0

Neraca Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 tidak memuat Aset Tetap.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya :
Rp0

Neraca Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 tidak memuat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek : Rp0

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek
(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak
Ketiga : Rp0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dana Pihak Ketiga (Biaya Perkara)	0	0
Jumlah	0	0

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum
Ditagihkan : Rp0

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

(dalam satuan rupiah)

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kuitansi UP yang Belum Dipertanggungjawabkan	0	0
Jumlah	0	0

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN : Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di berikut ini :

Rincian Uang Muka dari KPPN

(dalam satuan rupiah)

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.5. Ekuitas

Ekuitas : Rp2.041.900

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.041.900 dan Rp2.868.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp826.100 atau sebesar 28,80% dari nilai Ekuitas per 31 Desember 2023.

D. Penjelasan Atas Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB :
Rp65.956.618

Jumlah Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp65.956.618 dan Rp127.670.708. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan PNB

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	50.000	0	50.000	0,00
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	5.390.000	7.290.000	(1.900.000)	(26,06)
Pendapatan Ongkos Perkara	17.440.000	19.620.000	(2.180.000)	(11,11)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	41.609.500	62.073.500	(20.464.000)	(32,97)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.467.118	38.687.208	0	0,00
Total Pendapatan	65.956.618	127.670.708	(61.714.090)	(48,34)

Pendapatan PNB per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp61.714.090 atau sebesar 48,34%. Penurunan ini disebabkan oleh :

1. Menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penyediaan berbagai layanan hukum dan peradilan;
2. Menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Jasa Giro pada Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp0

Tidak terdapat Beban Pegawai pada Laporan Operasional Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp140.398.618

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp140.398.618 dan Rp177.325.599. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	140.398.618	177.325.599	(36.926.981)	(20,82)
Total Beban Persediaan	140.398.618	177.325.599	(36.926.981)	(20,82)

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp36.926.981 atau sebesar 20,82%, dengan pagu belanja anggaran untuk belanja persediaan barang konsumsi pada tahun anggaran 2024 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu belanja barang yang sama pada tahun anggaran 2023. Adapun persediaan barang konsumsi pada Pengadilan Negeri Simalungun berupa alat-alat tulis kantor yang digunakan pada proses penyelesaian perkara pidana perorangan di tingkat pertama, mulai dari proses pendaftaran perkara, pemeriksaan di persidangan, minutes, pengiriman salinan putusan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan terdakwa, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, serta proses dan/atau tahapan lain dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa : Rp130.658.450

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp130.658.450 dan

Rp55.488.500. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24.319.160	12.348.500	11.970.660	96,94
Beban Bahan	70.339.290	11.940.000	58.399.290	489,11
Beban Jasa Konsultan	36.000.000	31.200.000	4.800.000	15,38
Total Beban Jasa	130.658.450	55.488.500	75.169.950	135,47

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp75.169.950 atau sebesar 135,47%. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Meningkatnya beban pengiriman surat dinas/berkas perkara melalui pos pusat. Peningkatan ini terjadi antara lain karena diberlakukannya sistem surat tercatat dalam proses persidangan dan administrasi pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat yaitu PT Pos Indonesia (Persero);
2. Meningkatnya beban bahan berupa biaya penggandaan dan penjilidan berkas-berkas dalam proses penyelesaian perkara pidana, serta penyediaan konsumsi berupa makan siang untuk terdakwa yang bersidang di pengadilan dan personil pengamanan sidang dari Kepolisian;
3. Meningkatnya beban jasa konsultan berupa honor advokat/pengacara piket pada Layanan Posbakum. Hal ini terjadi karena pagu belanja jasa konsultan juga turut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan : Rp0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang telah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0,00
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan

Dinas : Rp50.250.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.250.000 dan Rp113.850.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	50.250.000	113.850.000	(63.600.000)	(55,86)

Total Beban Perjalanan Dinas	50.250.000	113.850.000	(63.600.000)	(55,86)
------------------------------	------------	-------------	--------------	---------

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp63.600.000 atau sebesar 55,86%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya frekuensi perjalanan dinas dalam kota seiring dengan telah diberlakukannya sistem surat tercatat dalam proses persidangan dan administrasi pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebelum diberlakukannya sistem surat tercatat, perjalanan dinas dalam kota pada Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan dalam rangka pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pengiriman salinan/petikan putusan, maupun pemberitahuan proses atau putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar.

D.7. Kegiatan Non Operasional

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional : Rp0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Total Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	0,00

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

D.8. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa : Rp0

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal :
Rp2.686.000

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.686.000 dan Rp3.789.500.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO :
(Rp255.350.450)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp255.350.450) dan (Rp218.993.391). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi : Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

E.4. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset : Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan : Rp0

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan (dalam satuan rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0

Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap : Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi : Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain :
Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Ekuitas

Transaksi Antar
Ekuitas :
Rp254.524.350

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp254.524.350 dan Rp218.071.891.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Ekuitas

(dalam satuan rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(65.956.618)
Ditagikan ke Entitas Lain	312.247.950
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	8.233.018
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	254.524.350

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL :
(Rp65.956.618);
DKEL : Rp312.247.950

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp65.956.618) sedangkan DKEL sebesar Rp312.247.950.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk :
Rp8.233.018,
Transfer Keluar :
Rp0

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk pada Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.233.018 yang terdiri dari :

Rincian Transfer Masuk

(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
-----	-------	--------------	-------

1.	Persediaan (Buku Agenda Sidang, Buku-Buku Pengadilan, Register Pengadilan, dan Perlengkapan Persidangan Lainnya)	Pengadilan Tinggi Medan	8.233.018
Jumlah			8.233.018

Tidak terdapat transfer keluar dari Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan periode pelaporan pada 31 Desember 2024.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

**Pengesahan Hibah
Langsung : Rp0,
Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung : Rp0**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pengesahan Hibah Langsung

(dalam satuan rupiah)

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	0
2.	-	-	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per 31 Desember 2024 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

E.6. Ekuitas Akhir

**Ekuitas Akhir :
Rp2.041.900**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.041.900 dan Rp2.868.000.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

*Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca*

Sampai dengan Laporan Keuangan ini selesai disusun tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang mempengaruhi Laporan Keuangan sehingga layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

*Temuan dan Tindak
Lanjut Temuan BPK*

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk Laporan Keuangan Tahun 2024 ini.

F.2.2. Informasi Rekening Satker

*Informasi Rekening
Satker*

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker sampai dengan periode 31 Desember 2024 terdiri dari rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya.

Rincian rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker adalah sebagai berikut :

*Rekening Bendahara
Pengeluaran*

1. Rekening Bendahara Pengeluaran

No.	Bank	Rekening Induk	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
1.	BRI	RKK DITJEN BADILUM O	BPG 005 PN SIMALUNGUN	654444003711000	Rp0

*Rekening
Pemerintah Lainnya*

2. Rekening Pemerintah Lainnya

No.	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
1.	BTN KC Pematangsiantar	RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	00069-01-30-000175-6	Rp2.750.150.884

F.2.3. Revisi DIPA

Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-005.03.2.400371/2024 tanggal 24 November 2023, *digital stamp* : 6890-3527-2542-4070, telah mengalami revisi sebanyak lima kali selama tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 tanggal 7 Februari 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap

- berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
2. Revisi ke-2 tanggal 19 April 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
 3. Revisi ke-3 tanggal 9 Juli 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
 4. Revisi ke-4 tanggal 4 Oktober 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
 5. Revisi ke-5 tanggal 24 Desember 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat satu ralat SSBP selama tahun 2024 atas pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang diperoleh melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Tabungan Negara KC Pematangsiantar untuk periode Juni 2024 senilai Rp1.467.118, berupa koreksi pada segmen Satker (semula : 400370, menjadi : 400371) dan Akun (semula : 425719, menjadi : 425764). Rincian atas ralat SSBP tersebut terlampir pada daftar data dukung Laporan Keuangan ini.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Capaian Output Berdasarkan Fungsi APBN

1. Capaian Output Berdasarkan Fungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun antara lain sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun

Tahun 2024

Kementerian : Mahkamah Agung Republik Indonesia (005)
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)
Satker : Pengadilan Negeri Simalungun (400371)
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan (03)

Sub Fungsi : Peradilan (03.04)

Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF)

Lokasi : Sumatera Utara/Kab. Simalungun (07.05)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312.500.000							
AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00	2	2	Kegiatan	100,00	
BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	275.000.000	274.747.950	99,91	327	452	Perkara	138,23	
QBA.032	Layanan Posbakum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00	91	140	Orang	153,85	
	Subtotal	312.500.000	312.247.950	99,92					
	Penyesuaian	0	0	0					
	Total	312.500.000	312.247.950	99,92					

Capaian Output
Prioritas Nasional

2. Capaian Output Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Simalungun terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII dari 7 Prioritas yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Prioritas Nasional VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan Prioritas Nasional ini melalui satu program prioritas dan satu kegiatan prioritas pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan pagu anggaran sebesar Rp36.000.000 dan realisasi pada periode pelaporan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.000.000 (100,00%), dengan rincian sebagai berikut :

Kementerian : Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Satker : Pengadilan Negeri Simalungun

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00	Orang	91	140	153,85
Jumlah	36.000.000	36.000.000	100,00	Orang	91	140	153,85

3. Daftar Pejabat Perbendaharaan

3.1. Kuasa Pengguna Anggaran

Daftar Pejabat Perbendaharaan

Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun atas nama Ruben Harlen Panjaitan, sesuai dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/ XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

3.2. Pejabat Pembuat Komitmen

Luky Afriani Sebayang, sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/SEK.PN.W2-U16/ SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

3.3. Pejabat Penandatanganan SPM

Mona Ileventy Lumbansiantar, sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/SEK.PN.W2-U16/ SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

3.4. Bendahara Pengeluaran

Frenky Adrianto Tampubolon, sesuai dengan Keputusan Sekretaris

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 658/SEK.PN.W2-U16/SK.KU1.1.1/XI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

3.5. Bendahara Penerimaan

Nova Carolina Ginting, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/SEK.PN.W2-U16/SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerimaan Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

Laporan Biaya Perkara

4. Laporan Biaya Perkara

Laporan biaya perkara per 31 Desember 2024 untuk Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematangsiantar terlampir pada daftar data dukung Laporan Keuangan ini.

Lampiran dan Daftar

Pengadilan Negeri Simalungun
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024
(dalam satuan rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - <i>UNAUDITED</i>						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
NIHIL									
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	

Pengadilan Negeri Simalungun
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024
(dalam satuan rupiah)

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-		-	

Daftar Data Dukung

Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Neraca Percobaan Akrua (Saldo Awal)
Neraca Percobaan Akrua
Neraca Percobaan Kas
LRA Belanja Menurut Akun
LRA Belanja Menurut Sumber Dana / Jenis Belanja / Akun
LRA Belanja Menurut Sumber Dana / Program / Kegiatan
LRA Menurut Sumber Dana / Program / Kegiatan / Output
LRA Pendapatan Menurut Akun
Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
Laporan Posisi BMN di Neraca
Laporan Persediaan
Laporan Biaya Perkara per 31 Desember 2024
Kertas Kerja Telaah
DIPA Petikan 400371 T.A. 2024
Rincian Kertas Kerja T.A. 2024
LPJ BPG 400371 Periode Desember 2024
LPJ BPN 400371 Periode Desember 2024
Rekening Koran BPG 400371
Rekening Koran RPL
Permohonan Persetujuan Perubahan Bank RPL
Laporan Pembukaan RPL pada BTN KC. Pematangsiantar
Laporan Penutupan RPL pada BRI KC. Pematangsiantar
Surat Pernyataan KPA Terkait Pendapatan Jasa Giro
BAST Transfer Masuk Persediaan
Koreksi SSBP

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM

Tgl Cetak : 24/02/25 3:27 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	65,956,618	127,670,708	(61,714,090)	(48.338)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	65,956,618	127,670,708	(61,714,090)	(48.338)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	65,956,618	127,670,708	(61,714,090)	(48.338)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	140,398,618	177,325,599	(36,926,981)	(20.824)
Beban Barang dan Jasa	130,658,450	55,488,500	75,169,950	135.469
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	50,250,000	113,850,000	(63,600,000)	(55.863)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:27 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	321,307,068	346,664,099	(25,357,031)	(7.315)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(255,350,450)	(218,993,391)	(36,357,059)	16.602
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(255,350,450)	(218,993,391)	(36,357,059)	16.602
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(255,350,450)	(218,993,391)	(36,357,059)	16.602

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 24/02/25 12:23 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:27 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,868,000	3,789,500	(921,500)	(24.32)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(255,350,450)	(218,993,391)	(36,357,059)	16.6
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	254,524,350	218,071,891	36,452,459	16.72
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(826,100)	(921,500)	95,400	(10.35)
EKUITAS AKHIR	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.8)

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN 400371

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:27 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	76,952,000	65,956,618	(10,995,382)	85.71	51,140,000	127,670,708	(76,530,708)	249.65
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	76,952,000	65,956,618	(10,995,382)	85.71	51,140,000	127,670,708	(76,530,708)	249.65
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	76,952,000	65,956,618	(10,995,382)	85.71	51,140,000	127,670,708	(76,530,708)	249.65
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	312,500,000	312,247,950	(252,050)	99.92	337,700,000	337,698,500	1,500	100
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	312,500,000	312,247,950	(252,050)	99.92	337,700,000	337,698,500	1,500	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN 400371

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:27 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	312,500,000	312,247,950	(252,050)	99.92	337,700,000	337,698,500	1,500	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:28 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)
JUMLAH ASET LANCAR	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)
JUMLAH ASET	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)
JUMLAH EKUITAS	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)
JUMLAH EKUITAS	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,041,900	2,868,000	(826,100)	(28.80)

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 400371

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
SUMATERA UTARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl. Cetak 25/02/2025 1:34 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,868,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	2,868,000
JUMLAH			2,868,000	2,868,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 23/02/25 4:11 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:28 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,041,900	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	312,247,950
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	65,956,618	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,233,018
0.0	391111	Ekuitas	0	2,868,000
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	50,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	5,390,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	17,440,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	0	41,609,500
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,319,160	0
3.0	521211	Beban Bahan	70,339,290	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,250,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	140,398,618	0
JUMLAH			389,305,586	389,305,586

Keterangan :

FINAL

SIMALUNGUN, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 24/02/25 12:23 PM
Tgl Cetak : 24/02/25 3:29 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	312,247,950
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	65,956,618	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	50,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	5,390,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	17,440,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	41,609,500
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,319,160	0
3.0	521211	Belanja Bahan	70,339,290	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131,339,500	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,250,000	0
JUMLAH			378,204,568	378,204,568

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 24 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
198112232009041004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 400371 **PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/02/25 1:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 25/2/25 11:27 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,246,000	24,422,000	24,319,160	0	24,319,160	99.58	102,840
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,246,000	24,422,000	24,319,160	0	24,319,160	99.58	102,840
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	63,080,000	70,374,000	70,339,290	0	70,339,290	99.95	34,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,080,000	70,374,000	70,339,290	0	70,339,290	99.95	34,710
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,674,000	131,454,000	131,339,500	0	131,339,500	99.91	114,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	85,674,000	131,454,000	131,339,500	0	131,339,500	99.91	114,500
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109,500,000	50,250,000	50,250,000	0	50,250,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	109,500,000	50,250,000	50,250,000	0	50,250,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH BELANJA	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 400371

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 25/02/25 1:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,246,000	24,422,000	24,319,160	0	24,319,160	99.58	102,840
521211	Belanja Bahan	63,080,000	70,374,000	70,339,290	0	70,339,290	99.95	34,710
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,674,000	131,454,000	131,339,500	0	131,339,500	99.91	114,500
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109,500,000	50,250,000	50,250,000	0	50,250,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH RUPIAH MURNI	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	TOTAL	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 400371

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 25/02/25 1:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 005030700KD SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 25/02/25 1:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 1049 AEA 52 5241 524113	RUPIAH MURNI Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Koordinasi BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.AEA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
BCA 52 5211 521114	Perkara Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat							
		18,246,000	24,422,000	24,319,160	0	24,319,160	99.58	102,840
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,246,000	24,422,000	24,319,160	0	24,319,160	99.58	102,840
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
		63,080,000	70,374,000	70,339,290	0	70,339,290	99.95	34,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,080,000	70,374,000	70,339,290	0	70,339,290	99.95	34,710
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi							
		85,674,000	131,454,000	131,339,500	0	131,339,500	99.91	114,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	85,674,000	131,454,000	131,339,500	0	131,339,500	99.91	114,500
5241 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		108,000,000	48,750,000	48,750,000	0	48,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	108,000,000	48,750,000	48,750,000	0	48,750,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	275,000,000	275,000,000	274,747,950	0	274,747,950	99.91	252,050
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.BCA	275,000,000	275,000,000	274,747,950	0	274,747,950	99.908	252,050
QBA 52 5221 522131	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Jasa Belanja Jasa Konsultan							
		36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.QBA	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 005030700KD SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 25/02/25 1:05 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1049	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
	JUMLAH BELANJA	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/02/25 1:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	140,000	50,000	0	50,000	35.71
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7,110,000	5,390,000	0	5,390,000	75.81
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	16,280,000	17,440,000	0	17,440,000	107.13
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	53,422,000	41,609,500	0	41,609,500	77.89
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	76,952,000	64,489,500	0	64,489,500	83.8
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118	0	1,467,118	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	1,467,118	0	1,467,118	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	76,952,000	65,956,618	0	65,956,618	85.71
	JUMLAH PENDAPATAN	76,952,000	65,956,618	0	65,956,618	85.71

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tanggal : 25/02/25 1:07 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,868,000
J U M L A H		2,868,000

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl.Data : 25/02/25 6:24 AM
Tgl.Cetak : 25/02/25 1:07 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,041,900
J U M L A H		2,041,900

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 25/02/25 6:24 AM
Tanggal : 25/02/25 1:07 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	615,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	195,000
1010301003	Penjepit Kertas	315,400
1010301006	Ordner Dan Map	264,000
1010301010	Alat Perekat	67,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	56,000
1010302001	Kertas HVS	215,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	314,500
Jumlah Barang Konsumsi		2,041,900
TOTAL		2,041,900

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
PERIODE 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (07) Sumatera Utara
Satuan Kerja : (400371) Pengadilan Negeri Simalungun

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
Januari s.d. Desember 2024	Biaya Perkara	179.045.996,00	462.057.000,00	451.172.370,00	189.930.626,00	185.612.626,00	4.318.000,00
	Biaya Eksekusi	237.363.500,00	905.840.610,00	786.463.610,00	356.740.500,00	356.740.500,00	0,00
	Biaya Konsinyasi	9.650.284.178,00	1.453.217.281,00	8.895.703.701,00	2.207.797.758,00	2.207.797.758,00	0,00
Jumlah		10.066.693.674,00	2.821.114.891,00	10.133.339.681,00	2.754.468.884,00	2.750.150.884,00	4.318.000,00

Simalungun, 24 Februari 2025
Sekretaris,



Ruben Harlen Panjaitan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
T.A. 2024 - UNAUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
 Kode dan Nama UAPPAW : (00KD) SUMATERA UTARA
 Kode dan Nama Eselon I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. <i>Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, <i>agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2.	LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	V		Ada
3.	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan				
1.	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2.	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3.	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4.	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi SAKTI/MonSAKTI termasuk perbandingan dengan tahun 2023?	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2.	Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V		Sama
3.	Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI				
To Do List		Ada	Tidak	Seharusnya

1.	Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V	Tidak
2.	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V	Tidak
3.	Terdapat Persediaan belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4.	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5.	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V	Tidak
6.	Terdapat Aset Belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7.	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8.	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9.	Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10.	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11.	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12.	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2.	Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3.	Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
Rekon Internal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak

2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai decimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak

9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXX dan 2XXXXX) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal		N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial		V	Tidak
2.	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			V	Ada/Tidak
1.	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak

3.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			N/A	Ada/Tidak
1.	Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	0		
2.	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)	0		
3.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2.	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3.	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrual?		N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		V	Ya

2.	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito	V		Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3.	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-Pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		N/A	Ya

	Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2.	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3.	Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4.	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4.	Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5.	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2.	Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
2.	Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
4.	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
5.	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2.	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3.	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?		N/A	Ya
5.	Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya
6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU		N/A	Ya

	pada Neraca			
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI"</i>				

Mengetahui,
Pejabat Penyusun LKKL,

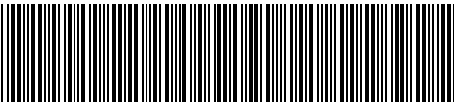


Ruben Harlen Panjaitan
NIP. 198112232009041004

Penelaah,



Luky Afriani Sebayang
NIP. 198404152009122003



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400371/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 05
Tanggal : 24 Desember 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
- Sebesar : Rp. 312.500.000 (TIGA RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 312.500.000
Rp. 312.500.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 312.500.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEMATANG SIANTAR (005) Rp. 312.500.000

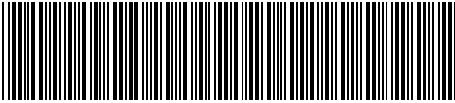
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 28 Agustus 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

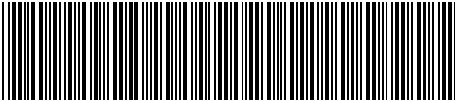
Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				312.500.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				312.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		6. 03	-				
		7. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan		1.500.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	2.00	kegiatan		1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	327,00	Perkara, Berkas Perkara		275.000.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	327.00	Perkara		275.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	91,00	Orang		36.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	91.00	Orang		36.000.000

Jakarta, 28 Agustus 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
I B. SUMBER DANA



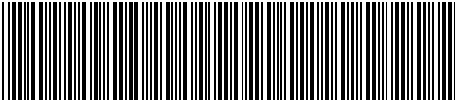
DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	312.500.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	312.500.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Kewenangan : (KD)

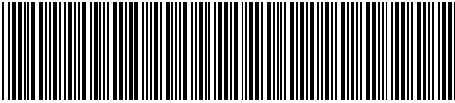
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	-	312.500	-	-	-	312.500	07 . 05	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	312.500	-	-	-	312.500		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	312.500	-	-	-	312.500		
1049.AEA	Koordinasi (07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)	-	1.500	-	-	-	1.500		
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (07.00 SUMATERA UTARA / SUMATERA UTARA)	-	275.000	-	-	-	275.000		
01	RM	-	275.000	-	-	-	275.000		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)	-	36.000	-	-	-	36.000	07 . 05	
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	005	
JUMLAH		-	312.500	-	-	-	312.500		

Jakarta, 28 Agustus 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

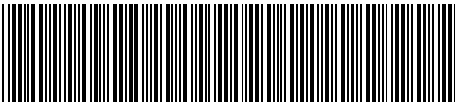
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN														
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	34.967	22.998	23.750	29.500	23.000	21.239	312.500	
		BELANJA BARANG	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	34.967	22.998	23.750	29.500	23.000	21.239	312.500	
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	34.967	22.998	23.750	29.500	23.000	21.239	312.500	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	34.967	22.998	23.750	29.500	23.000	21.239	312.500	
		PERKIRAAN PENERIMAAN	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.442	76.952	
		- PNBP (425231)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	19	140	
		- PNBP (425232)	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	598	7.110
		- PNBP (425233)	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.364	16.280
		- PNBP (425239)	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.461	53.422

Jakarta, 28 Agustus 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
IV A. B L O K I R



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [400371] PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

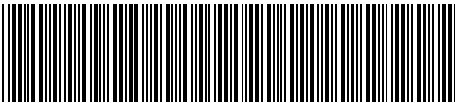
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 28 Agustus 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
IV B. C A T A T A N



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [400371] PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 28 Agustus 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN REVISI KE - 5 T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(400371)

Rp. 312,500,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			312,500,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			312,500,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	2.0 kegiatan		1,500,000	

	Lokasi : KAB. SIMALUNGUN				
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	2.0 kegiatan		1,500,000	
052	Dukungan Penyelesaian Perkara			1,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,500,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Perjalanan KIMWASMAT	10.0 OK	150,000	1,500,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	327.0 Perkara, Berkas Perkara		275,000,000	

	Lokasi : SUMATERA UTARA				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	327.0 Perkara		275,000,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			135,718,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			135,718,000	
521211	Belanja Bahan			4,264,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	328.0 PKR	13,000	4,264,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			131,454,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Alat Tulis Kantor	327.0 PKR	402,000	131,454,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			20,550,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,550,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			5,700,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	285.0 OK	20,000	5,700,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,850,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	99.0 OK	150,000	14,850,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			56,450,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			56,450,000	
521211	Belanja Bahan			56,450,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Konsumsi Makan Terdakwa	1705.0 OK	25,000	42,625,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Polisi	553.0 OK	25,000	13,825,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			7,064,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			7,064,000	

RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN REVISI KE - 5 T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(400371)

Rp. 312,500,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.005-Pematang Siantar) - Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	302.0 OK	7,000	2,114,000 2,114,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar) - Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	33.0 OK	150,000	4,950,000 4,950,000	RM
056	Minutasi/Upaya hukum			9,660,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,660,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.005-Pematang Siantar) - Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	322.0 PKR	30,000	9,660,000	RM
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			27,660,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			27,660,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.005-Pematang Siantar) - Pengiriman Berkas Perkara Banding	320.0 PKR	33,000	10,560,000 10,560,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar) - Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa - Pemberitahuan Putusan Banding	68.0 OK 46.0 OK	150,000 150,000	10,200,000 6,900,000	RM
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			17,898,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,898,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.005-Pematang Siantar) - Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	112.0 PKR	54,000	6,048,000 6,048,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar) - Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum - Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	55.0 OK 24.0 OK	150,000 150,000	8,250,000 3,600,000	RM
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	91.0 Orang		36,000,000	

1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	91.0 Orang		36,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			36,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			36,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.005-Pematang Siantar) - Honor Advokat/Pengacara Piket [1 ORG x 15 KEG x 12 BLN x 2 JAM	360.0 OJ	100,000	36,000,000 36,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-005.03.2.400371/2024

Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.05) SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN

KPPN : (005) Pematang Siantar

Satuan Kerja : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00016/DRPP/400371/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	15.069.050,00	5.000.000,00	20.069.050,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	15.069.050,00	5.000.000,00	20.069.050,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	15.069.050,00	0,00	15.069.050,00	0,00
	1. BP UP*)	15.069.050,00	0,00	15.069.050,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom
NIP 198404152009122003

KAB. SIMALUNGUN, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



FRENKY ADRIANTO TAMPUBOLON
NIP 199410242020121009

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 654444003711000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00016/DRPP/400371/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
----	---------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
----	----------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



FRENKY ADRIANTO TAMPUBOLON
NIP 199410242020121009

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom
NIP 198404152009122003

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 400371

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	654444003711000	BPG 005 PN SIMALUNGUN	BRI Cabang Pematangsiantar	20	S-761/PB.3/2021	21-04-2021	2024-12-31	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



FRENKY ADRIANTO TAMPUBOLON
NIP 199410242020121009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Propinsi / Kabupaten / Kota : (07.05) SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN
Satuan Kerja : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN40037100-
No Rekening : 654444003711000
Nama Rekening : BPG 005 PN SIMALUNGUN
Nama Bank : BRI Cabang Pematangsiantar
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			14.031.660,00
04-12-2024	FPK-PENG-qlfWxRE8U6INfa6	[DARI TUNAI] Tarik Tunai UP RM 400371	0,00	5.000.000,00	9.031.660,00
05-12-2024	00334/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Amplop Dinas Sebanyak 900 Lembar	0,00	1.366.000,00	7.665.660,00
20-12-2024	FPK-PENG-ItvUobi3aPbmKMO	GUP Nihil Sebagian Satker 400371	0,00	0,00	7.665.660,00
24-12-2024	00337/KW/400371/2024	Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Dinas Pos Pusat Berupa Surat Penahanan/Perpanjangan Penahanan Sebanyak 31 Buah	0,00	459.800,00	7.205.860,00
27-12-2024	00341/KW/400371/2024	Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Dinas Pos Pusat Berupa Berkas Perkara Banding Sebanyak 12 Buah	0,00	187.000,00	7.018.860,00
27-12-2024	00342/KW/400371/2024	Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Dinas Pos Pusat Berupa Berkas Perkara Kasasi Sebanyak 2 Buah	0,00	31.000,00	6.987.860,00
31-12-2024	00440/SSBP/400371/2024	Setor Sisa UP RM 400371	0,00	6.861.860,00	126.000,00
31-12-2024	00345/KW/400371/2024	Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Dinas Pos Pusat Berupa 5 Buah Berkas Perkara Banding	0,00	126.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		dan 3 Buah Berkas Perkara Kasasi			
31-12-2024	FPK-PENG- dn0wrqmAjKzWLGT	GUP Nihil Satker 400371	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	14.031.660,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



FRENKY ADRIANTO TAMPUBOLON

NIP 199410242020121009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi/Kabupaten/Kot : (07.05) SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN
Satuan Kerja : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-005.03.2.400371/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (005) Pematang Siantar
Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 2.750.150.884,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00027/PKB/400371/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	3.284.718.229,00	63.879.500,00	598.446.845,00	2.750.150.884,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	3.284.718.229,00	63.879.500,00	598.446.845,00	2.750.150.884,00
B.	BP Selain Kas	3.284.718.229,00	63.879.500,00	598.446.845,00	2.750.150.884,00
	1. BP PNPB	0,00	6.018.500,00	6.018.500,00	0,00
	2. BP DPK	3.284.718.229,00	57.861.000,00	592.428.345,00	2.750.150.884,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	2.750.150.884,00
3.	Jumlah Kas	Rp	2.750.150.884,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	2.750.150.884,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	2.750.150.884,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	6.018.500,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	6.018.500,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	6.018.500,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	6.018.500,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	6.018.500,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



RUBEN HARLEN PANJAITAN

NIP 198112232009041004

KAB. SIMALUNGUN , 06 Januari 2025

Bendahara Penerimaan



NOVA CAROLINA GINTING

Nip 198711222019032006

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Penerimaan
Periode Desember 2024

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 2.750.150.884,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00027/PKB/400371/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	2.750.150.884
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	2.750.150.884
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	2.750.150.884
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	2.750.150.884
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	2.750.150.884
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	6.018.500
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	6.018.500
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	6.018.500
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



NOVA CAROLINA GINTING
Nip 198711222019032006

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 400371 (PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN)

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	0006901300001756	RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KC Pematangsiantar	30	000062	10-06-2024	31-12-2024	2,750,150,884.00

Bendahara Penerimaan,



NOVA CAROLINA GINTING
Nip 198711222019032006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN (400371)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)
Virtual Account : 654444003711000 | BPG 005 PN SIMALUNGUN
Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-04	08:23:51	36213304	REGULAR_65444_4003711000	14.031.660,00	5.000.000,00	0,00	9.031.660,00	TELLER_CARD	
2024-12-05	17:00:45	36336419	From 654444003711000 to 020601009815301 BRIVA1236260014069018CMS DIGIPAY FRENKY	9.031.660,00	1.366.000,00	0,00	7.665.660,00	CMS	
2024-12-24	17:49:29	37070882	From 654444003711000 to 534101006794535 VA654444003711000Surat Penahanan 24 Des	7.665.660,00	459.800,00	0,00	7.205.860,00	CMS	
2024-12-28	07:00:17	37188138	From 654444003711000 to 534101006794535 VA654444003711000Pos Kasasi 27 Des	7.205.860,00	31.000,00	0,00	7.174.860,00	CMS	
2024-12-28	07:00:18	37188147	From 654444003711000 to 534101006794535 VA654444003711000Pos Banding 27 Des	7.174.860,00	187.000,00	0,00	6.987.860,00	CMS	
2024-12-31	16:53:15	37366736	VA654444003711000Pos 03 31 Des 24	6.987.860,00	126.000,00	0,00	6.861.860,00	CMS	
2024-12-31	16:58:02	37366822	MPN DJA (Prefix 7,8,9)transfer	6.861.860,00	6.861.860,00	0,00	0,00	NCMS	
			Total Mutasi		14.031.660,00	0,00			
			Saldo Akhir				0,00		



Transaction History

Company	: RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA
Account	: 0006901300001756 - RPL 005 PDT PN SML U
Account Organization Unit	: KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
Period	: 01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Starting Balance	: IDR 3,284,718,229.00
Ending Balance	: IDR 2,750,150,884.00
Total Transaction Debit	: 9
Total Transaction Credit	: 66
Page	: 1 of 3

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	02/12	09:29:19	02/12	09:29:19	0098899788324120001 GOKMAULI SAGALA SH GOKMAULI SAGALA SH BANK BTN NBMB0000 6013012244211923 768900866877	0.00	818,000.00	3,285,536,229.00	24120299729990281932
2	02/12	09:56:40	02/12	09:56:40	98899788324120003 Netty Mewahaty Simbolo DR 00000001070033223324 NETTY MEWAHATY S 000028526069 BMRI MANDIRI	0.00	14,000.00	3,285,550,229.00	24120296219996912571
3	02/12	14:54:45	02/12	14:54:45	0098899788324120004 LIKKAR PURBA DR SAVITRI PINT BANK BCA G997Z0RN 5307952053553575 000000000083	0.00	120,000.00	3,285,670,229.00	24120293000380876369
4	02/12	15:31:14	02/12	15:31:14	98899788324120007 Hengki Silaen DR 00000000000232545917 HENGKI SILAEN 000037665587 BNI 46	0.00	40,500.00	3,285,710,729.00	24120296219996966706
5	02/12	17:57:41	02/12	17:57:41	0098899788324120005 JONLI SINAGA DR JONLI SINAGA MANDIRI 070004508323 S1RH1JQD 4617006017631098 9272	0.00	1,088,000.00	3,286,798,729.00	24120299499990780415
6	03/12	10:27:23	03/12	10:27:23	CAIR CEK TQ 508145 OIH ADE TRIANI SARAGI	25,000,000.00	0.00	3,261,798,729.00	24120300174700000027
7	03/12	11:56:45	03/12	11:56:45	BY EKSEKUSI KONS NO.4 PN SMLNGUN	0.00	2,660,000.00	3,264,458,729.00	24120300174700000043
8	03/12	11:57:40	03/12	11:57:40	BY EKSEKUSI KONS NO.3 PN SMLUNGUN	0.00	2,660,000.00	3,267,118,729.00	24120300174700000045
9	03/12	11:58:43	03/12	11:58:43	BY EKSEKUSI KONS NO.2 PN SMLUNGUN	0.00	2,710,000.00	3,269,828,729.00	24120300174700000047
10	03/12	11:59:15	03/12	11:59:15	BY EKSEKUSI KONS NO.24 PN SMLUNGUN	0.00	2,740,000.00	3,272,568,729.00	24120300174700000049
11	03/12	14:25:49	03/12	14:25:49	DR 00000033601018113531 GOKMAULI SAGALA 000092819442 BRI	0.00	1,400,000.00	3,273,968,729.00	24120396219997101337
12	03/12	14:30:25	03/12	14:30:25	98899788324120006 Okky Wiratmoko DR 00000001070021240777 OKKY WIRATMOKO 000020834831 BMRI MANDIRI	0.00	818,000.00	3,274,786,729.00	24120396219997101922
13	03/12	19:08:09	03/12	19:08:09	98899788324120009 Irwan Atmaja Sinaga DR 00000000003707332035 NURMAIDA SIREGAR 000039146615 BNI 46	0.00	998,000.00	3,275,784,729.00	24120396219997138265
14	04/12	19:31:33	04/12	19:31:33	98899788324120011 Netty Mewahaty Simbolo DR 00000001070033223324 NETTY MEWAHATY S 000026548609 BMRI MANDIRI	0.00	1,148,000.00	3,276,932,729.00	24120496219997712314
15	04/12	20:04:44	04/12	20:04:44	98899788324120012 Netty Mewahaty Simbolo DR 00000001070033223324 NETTY MEWAHATY S 000026582374 BMRI MANDIRI	0.00	120,000.00	3,277,052,729.00	24120496219997716158
16	05/12	09:13:14	05/12	09:13:14	98899788324120013 HENGKI SILAEN DR 00000000000342042994 KARTOBA HUTAPEA 000083751188 BCA	0.00	972,000.00	3,278,024,729.00	24120596219997762508
17	05/12	09:24:31	05/12	09:24:31	0098899788324120010 EGARAROSINDA SIHOMBI DR SDRI ROSINDA BANK BNI 001717917798 S1CIB001 6010043330000019 100000685046	0.00	963,000.00	3,278,987,729.00	24120599419990726360
18	05/12	12:15:51	05/12	12:15:51	sisa panjar No 142 PDT.G 2023 PNSIM TRF 00000338201035088539 HENGKY SILAEN 001568598841 BRI	1,365,500.00	0.00	3,277,622,229.00	24120596159990753340
19	05/12	12:26:43	05/12	12:26:43	PENGEMBALIAN ECOURT BANDING DITOLAK TRF 00000338201035088539 HENGKY SILAEN 000178992036 BRI	972,000.00	0.00	3,276,650,229.00	24120596159990753454
20	05/12	12:34:10	05/12	12:34:10	0098899788324120014 NORAIDA DAMANIK NORAIDA DAMANIK BANK BTN WBNK0000 6013012084619078 511732969342	0.00	120,000.00	3,276,770,229.00	24120593000010678881
21	05/12	14:05:42	05/12	14:05:42	Panjar banding no 142.2023 DR 00000000000342042994 KARTOBA HUTAPEA 000085527992 BCA	0.00	1,510,000.00	3,278,280,229.00	24120596219997805971
22	06/12	12:22:43	06/12	12:22:43	sisa panjar No 136 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000000008000659577 DAULAT SIHOMBIN 000848920109 BCA	631,500.00	0.00	3,277,648,729.00	24120696159990753857
23	06/12	12:29:47	06/12	12:29:47	TRF 00000001070004907277 MANGEMBANG PAND 001444448195 BMRI MANDIRI	521,000.00	0.00	3,277,127,729.00	24120696159990753951
24	06/12	17:28:12	06/12	17:28:12	0098899788324120016 JUNIANTI TUMANGGOR DR JUNIANTI TUM 050310846233 62813807 5644170050310846 061143979943	0.00	818,000.00	3,277,945,729.00	24120693000650674616
25	09/12	09:37:42	09/12	09:37:42	98899788324120017 LISDA MARLIANA DAMANIK DR 00000000000702598494 DOMPET ANAK BANG 000066322354 PERMATABANK PERMATA BANK	0.00	120,000.00	3,278,065,729.00	24120996219998296535
26	09/12	11:21:48	09/12	11:21:48	98899788324120018 SETIA SIMANJUNTAK DR 00000001070020809507 SETIA SIMANJUNTA 000026160632 BMRI MANDIRI	0.00	120,000.00	3,278,185,729.00	24120996219998309393
27	09/12	17:55:22	09/12	17:55:22	0098899788324120019 RICO RINALDY NAINGGO DR EDWARD SINAM BANK BCA ACMB9503 5260512053911994 000000617587	0.00	1,690,500.00	3,279,876,229.00	24120993000410925585
28	09/12	22:06:32	09/12	22:06:32	0098899788324120020 ABDI MARULITUA PURBA DR INDIRA MULIA KEB HANA OI360484 6064205011188080 107505	0.00	1,178,000.00	3,281,054,229.00	24120993000940723035

Transaction History

Company	: RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA
Account	: 0006901300001756 - RPL 005 PDT PN SML U
Account Organization Unit	: KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
Period	: 01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Starting Balance	: IDR 3,284,718,229.00
Ending Balance	: IDR 2,750,150,884.00
Total Transaction Debit	: 9
Total Transaction Credit	: 66
Page	: 2 of 3

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
29	09/12	22:28:49	09/12	22:28:49	0098899788324120021 ABDI MARULITUA PURBA DR INDIRA MULIA KEB HANA OI360484 6064205011188080 108934	0.00	1,178,000.00	3,282,232,229.00	24120993000940816648
30	09/12	22:48:13	09/12	22:48:13	0098899788324120022 ABDI MARULITUA PURBA DR INDIRA MULIA KEB HANA OI360484 6064205011188080 109952	0.00	1,193,000.00	3,283,425,229.00	24120993000940892410
31	10/12	02:31:50	10/12	02:31:50	0098899788324120023 ABDI MARULITUA PURBA DR INDIRA MULIA KEB HANA OI360484 6064205011188080 111488	0.00	1,178,000.00	3,284,603,229.00	24121093000950977968
32	10/12	11:58:59	10/12	11:58:59	PBY PK 82/PDT.6/2021/PN SIM	0.00	6,950,000.00	3,291,553,229.00	24121000180280000027
33	10/12	14:42:02	10/12	14:42:02	0098899788324120024 GITA YUNI SARI DR ARNOLD TAMPU BANK BRI 101012133531 26169797 6013018009820626 000007684633	0.00	818,000.00	3,292,371,229.00	24121093000620749750
34	10/12	16:46:35	10/12	16:46:35	98899788324120025 SEPRI IJON MAUJANA SAR DR 00000000008200724667 SEPRI IJON MAUJA 000011387756 BCA	0.00	1,588,000.00	3,293,959,229.00	24121096219998448402
35	11/12	12:12:09	11/12	12:12:09	sisa panjar BandingNo 75 PDT.G 2024 PNSI TRF 00000011301064412507 HIKMA ANITA SIR 001576298983 BRI	70,500.00	0.00	3,293,888,729.00	24121196159990753210
36	12/12	10:22:17	12/12	10:22:17	PENGEMBALIAN ECOURT DITOLAKAn. Esah Sara TRF 00000000008200724667 SEPRI IJON MAUJ 000460214008 BCA	1,588,000.00	0.00	3,292,300,729.00	24121296159990751958
37	12/12	11:35:43	12/12	11:35:43	0098899788324120028 HOTIYAH HOTIYAH BANK BTN NBMB0000 6013011093470531 773676523132	0.00	120,000.00	3,292,420,729.00	24121299779990876197
38	14/12	09:06:58	14/12	09:06:58	98899788324120030 MARIHOT FRANDUS SINAGA DR 00000001060018522717 MARIHOT FRANDUS 000026099603 BMRI MANDIRI	0.00	818,000.00	3,293,238,729.00	24121496219998734357
39	15/12	20:29:40	15/12	20:29:40	98899788324120031 mangembangpandiangn DR 00000001070004907277 MANGEMBANG PANDI 000023447854 BMRI MANDIRI	0.00	120,000.00	3,293,358,729.00	24121596219998829183
40	16/12	16:04:44	16/12	16:04:44	0098899788324120032 IDON AMBARITA IDON AMBARITA BANK BTN NBMB0000 6013011226944204 775508810000	0.00	120,000.00	3,293,478,729.00	24121693000080100904
41	17/12	09:54:04	17/12	09:54:04	98899788324120034 LISDA MARLIANA DAMANIK DR 00000000000702598494 DOMPET ANAK BANG 000066863094	0.00	120,000.00	3,293,598,729.00	24121796219998933747
42	17/12	11:10:37	17/12	11:10:37	PERMATABANK PERMATA BANK Penambahan panjar 147 DR 00000000000383613410 INDIRA MULIANI 000023207247 BNI 46	0.00	1,200,000.00	3,294,798,729.00	24121796219998940035
43	17/12	11:54:23	17/12	11:54:23	biaya perkara 158 DR 000000009000017739047 PONDANG HASIBUAN 000028919847 BMRI MANDIRI	0.00	1,100,000.00	3,295,898,729.00	24121796219998943634
44	18/12	11:12:11	18/12	11:12:11	Panjar perkara G.s DR 00000000008200744161 BISMAR PARDOMUAN 000048745791 BCA	0.00	240,000.00	3,296,138,729.00	24121896219999070899
45	18/12	11:17:35	18/12	11:17:35	98899788324120035 SAMSUL DR 00000000007027730927 FLIPTECH LENTERA 000065073528 PERMATABANK PERMATA BANK	0.00	120,000.00	3,296,258,729.00	24121896219999071331
46	18/12	15:00:21	18/12	15:00:21	98899788324120036 SUMARNI DR 00000000007027730927 FLIPTECH LENTERA 000065114103 PERMATABANK PERMATA BANK	0.00	120,000.00	3,296,378,729.00	24121896219999088112
47	18/12	16:23:35	18/12	16:23:35	0098899788324120037 EGARASIHAR TAGOR JOS DR - SIHAR TAGO BANK BNI 000951991135 S1CIB001 6010043330000019 100000582703	0.00	818,000.00	3,297,196,729.00	24121899489990972086
48	19/12	09:44:19	19/12	09:44:19	98899788324120038 Rikarman Damanik DR 00000000003320129916 FLIPTECH LENTERA 000037277982 DBS	0.00	120,000.00	3,297,316,729.00	24121996219991661592
49	19/12	11:33:47	19/12	11:33:47	CAIR CEK TQ 508146 OLH ADE TRIANI SARAGI	552,279,845.00	0.00	2,745,036,884.00	24121900174700000027
50	19/12	13:19:42	19/12	13:19:42	Panjar Sita Eksekusi 6/Pdt.G.S/2024 DR 00000000010836311410 INDIRA MULIANI 000000090712 HANA	0.00	2,600,000.00	2,747,636,884.00	24121996219992379295
51	19/12	14:19:18	19/12	14:19:18	DR TIURMA JULIA BANK BRI 5221845076963149 ATM WBNK0000 REF 512213186938	0.00	1,100,000.00	2,748,736,884.00	24121993000040080993
52	19/12	15:14:01	19/12	15:14:01	DR ELJONES SIMA BANK BCA 6019005081521028 ATM ACMB9503 REF 000000870055	0.00	900,000.00	2,749,636,884.00	24121993000390518556
53	19/12	15:56:54	19/12	15:56:54	98899788324120039 DrsMARUDUT HUTAJULU SH DR 00000000001755338828 HOBBIN GULTOM 000025530743 BNI 46	0.00	23,000.00	2,749,659,884.00	24121996219992390825
54	19/12	16:54:40	19/12	16:54:40	0098899788324120042 ROSMAULI BR MAJORANG ROSMAULI BR MAJORANG BANK BTN WBNK0000 5221849001475351 512219253783	0.00	120,000.00	2,749,779,884.00	24121993000090305885
55	19/12	17:52:56	19/12	17:52:56	DR ELJONES SIMA BANK BCA 6019005081521028 ATM ACMB9503 REF 000000257603	0.00	400,000.00	2,750,179,884.00	24121993000410763987
56	20/12	08:37:56	20/12	08:37:56	0098899788324120041 NASIB TAMPUBOLON NASIB TAMPUBOLON BANK	0.00	818,000.00	2,750,997,884.00	24122099719990829246

Transaction History

Company	: RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA
Account	: 0006901300001756 - RPL 005 PDT PN SML U
Account Organization Unit	: KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
Period	: 01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
Starting Balance	: IDR 3,284,718,229.00
Ending Balance	: IDR 2,750,150,884.00
Total Transaction Debit	: 9
Total Transaction Credit	: 66
Page	: 3 of 3

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
57	20/12	09:06:56	20/12	09:06:56	BTN NBMB0000 6013010264380545 777121848554 0098899788324120040 SRI WAHYUNI SRI WAHYUNI BANK BTN NBMB0000	0.00	818,000.00	2,751,815,884.00	24122099729990097087
58	20/12	09:42:49	20/12	09:42:49	6013018009672803 777133335586 0098899788324120043 EGARAMANRIHOT MARTUA DR SDR DIAN MOR BANK BNI	0.00	23,000.00	2,751,838,884.00	24122099419990452214
59	20/12	11:17:59	20/12	11:17:59	000503323011 S1CIB001 6010043330000019 100000499464 BY PNMBHAN PNJAR PRKARA	0.00	1,500,000.00	2,753,338,884.00	24122000174700000008
60	20/12	15:41:31	20/12	15:41:31	82/PDT.G/2021/PN DR 00000033601018113531 GOKMAULI SAGALA 000048770543 BRI	0.00	2,600,000.00	2,755,938,884.00	24122096219992474288
61	20/12	17:32:49	20/12	17:32:49	0098899788324120044 BUDIMAN DR WIDYA SULIST BKE MB000045 6048200011001666	0.00	120,000.00	2,756,058,884.00	24122093000410683509
62	20/12	18:02:04	20/12	18:02:04	090192605748 0098899788324120045 GOKMAULI SAGALA SH GOKMAULI SAGALA SH BANK BTN	0.00	294,000.00	2,756,352,884.00	24122093000120931307
63	23/12	10:09:31	23/12	10:09:31	NBMB0000 6013012244211923 777377344070 DR NATALINA SIN BANK BRI 6013011227401444 ATM WBNK0000 REF	0.00	1,400,000.00	2,757,752,884.00	24122399749990246014
64	23/12	10:59:20	23/12	10:59:20	512333337411 98899788324120048 DrsMARUDUT HUTAJULU SH DR 00000000001755338828	0.00	23,000.00	2,757,775,884.00	24122396219992656701
65	23/12	11:52:04	23/12	11:52:04	HOBBIN GULTOM 000029180443 BNI 46 0098899788324120047 LIKKAR PURBA DR SAVITRI PINT BANK BCA G997Z0RP	0.00	120,000.00	2,757,895,884.00	24122393000350258862
66	23/12	11:52:52	23/12	11:52:52	5307952053553575 0000000000928 0098899788324120049 ABDI MARULITUA PURBA DR INDIRA MULIA KEB HANA	0.00	15,000.00	2,757,910,884.00	24122393000830265790
67	23/12	15:00:26	23/12	15:00:26	010836311410 OI360484 6064205011188080 034553 CAIR CEK TQ 508147 OLH ADE TRIANI SARAGI	10,000,000.00	0.00	2,747,910,884.00	24122300174700000074
68	24/12	09:59:51	24/12	09:59:51	TAMBAHAN BY EKSEKUSI KONS NO.24/JUNAI DI	0.00	900,000.00	2,748,810,884.00	24122400174700000014
69	24/12	10:00:22	24/12	10:00:22	TAMBAHAN BY EKSEKUSI KONS NO.3/JUNAI DI	0.00	900,000.00	2,749,710,884.00	24122400174700000016
70	24/12	10:56:34	24/12	10:56:34	98899788324120051 Pondang Hasibuan SH DR 00000009000017739047 PONDANG HASIBUAN 000021567694 BMRI MANDIRI	0.00	35,500.00	2,749,746,384.00	24122496219992762304
71	26/12	11:27:18	26/12	11:27:18	98899788324120052 boston michael sitinja DR 00000000000876700302 BOSTON MICHAEL S	0.00	15,000.00	2,749,761,384.00	24122696219992949272
72	27/12	14:35:10	27/12	14:35:10	000032392254 BNI 46 98899788324120055 NURIATISILALAH I DR 00000000007179512178 SARIWAHYUNITURNI	0.00	120,000.00	2,749,881,384.00	24122796219993052820
73	27/12	15:06:37	27/12	15:06:37	000005103530 BSI 0098899788324120053 JARAMEL SIDAURUK DR LULI GALI MANDIRI 070012888907	0.00	120,000.00	2,750,001,384.00	24122793000630992072
74	28/12	08:39:50	28/12	08:39:50	78207068 6032985400406097 436230248149 98899788324120054 VALENTINA SIADARI DR 00000001050016430443 VALENTINA SIADAR	0.00	120,000.00	2,750,121,384.00	24122896219993122390
75	31/12	08:54:39	31/12	08:54:39	000029287349 BMRI MANDIRI 98899788324120056 Zainul Arifin 8899 000	0.00	29,500.00	2,750,150,884.00	24123100198270000002
Total						592,428,345.00	57,861,000.00		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : **296**/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan
Bank Tempat Pembukaan Rekening

Simalungun, 3 Mei 2024

Yth. Kepala KPPN Pematangsiantar
Jl. Brigjend. Rajamin Purba Nomor 119,
Pematangsiantar 21111

Merujuk pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
2. Surat kami Nomor W2.U16/3138/Ku.01.1/9/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening;
3. Surat Saudara Nomor S-571/KPN.0204/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Pengadilan Negeri Simalungun;

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan rekening dari :

Nomor rekening : 0113.01.002826.30.4

Nama rekening : RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA

Bank : Bank Rakyat Indonesia KC. Pematang Siantar

ke Bank Tabungan Negara KC. Pematang Siantar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bank BTN mendukung layanan perbankan berbasis elektronik/*e-banking* yang mempermudah transaksi/pembayaran terkait biaya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Bank BTN siap untuk mendukung pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi pada Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Bank BTN berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada rekening penampung biaya perkara.

Adapun jenis rekening, tujuan penggunaan, sumber dana, perlakuan jasa giro, dan mekanisme penyaluran dan rekening adalah sama sebagaimana pada surat kami tersebut di atas.

Apabila permohonan persetujuan pembukaan rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Soraya Rizna Afrijal
NIP. 199110032014032004

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

SURAT KUASA

Nomor 297/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soraya Rizna Afrijal, S.H.
NIP : 199110032014032004
Jabatan : Plt. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Memberikan kuasa penuh kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah;

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga atas seluruh rekening kategori Pemerintah Pusat pada PT. Bank Rakyat Indonesia KC. Pematang Siantar atas nama RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA, untuk melakukan pengelolaan rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
2. Melakukan blokir atas rekening;
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening Kas Umum Negara.

Surat kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun, 3 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Soraya Rizna Afrijal
NIP. 199110032014032004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-295/KPN.0204/2024 13 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Dana Titipan Atas
Nama Pengadilan Negeri Simalungun

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 3 Mei 2024 Nomor 296/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024 hal Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening Dana Penampungan Dana Titipan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pematangsiantar untuk keperluan Penampungan Dana Titipan Untuk Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun. Rekening tersebut akan diberi nama: **RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA.**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk:

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 - b. Melaporkan penutupan Rekening lama paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 - c. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (setiap bulannya).
 - d. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - e. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - f. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila:
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Pematang Siantar, kami berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan dengan motto CETAR : Cepat, Transparan, dan Responsif.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 340/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening
Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL
005 PDT PN SML UNTUK BIAYA
PERKARA

Simalungun, 28 Mei 2024

Yth. Kepala KPPN Pematangsiantar
Jl. Brigjend. Rajamin Purba Nomor 119,
Pematangsiantar 21111

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Nomor S-295/KPN.0204/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Dana Titipan Atas Nama Pengadilan Negeri Simalungun, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematangsiantar pada tanggal 14 Mei 2024, dengan nomor rekening : 00069-01-30-000175-6, nama rekening : "RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA".

Bersama ini juga kami sampaikan agar rekening tersebt dimasukkan dalam program *Treasury Notional Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Soraya Rizna Afrijal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai laporan.

No. : **334** /S/STRV/2024
Lamp : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Nomor Rekening

Pematangsiantar, 14 Mei 2024

Kepada Yth:
Ibu Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Di
Jalan Asahan KM. 4 Marihat Baris, Simalungun

Dengan hormat,

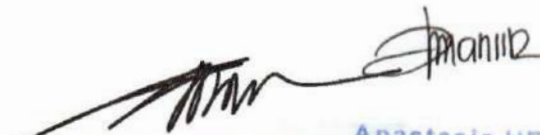
Pertama-tama diucapkan terima kasih atas kepercayaan **Pengadilan Negeri Simalungun** kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pematangsiantar, semoga kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini dapat ditingkatkan lagi.

Dengan ini disampaikan nomor rekening yang telah dibentuk untuk menampung dana titipan atas nama Pengadilan Negeri Simalungun dengan detail sebagai berikut:

Nama	Nomor Rekening
RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	00069-01-30-000175-6

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Kantor Cabang Pematangsiantar


Anastasia HERM
Yudhistiro Eko Sejati DBM Business
PJ Branch Manager



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 341/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening
Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL
005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA
PERKARA

Simalungun, 28 Mei 2024

Yth. Kepala KPPN Pematangsiantar
Jl. Brigjend. Rajamin Purba Nomor 119,
Pematangsiantar 21111

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Nomor S-295/KPN.0204/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Dana Titipan Atas Nama Pengadilan Negeri Simalungun, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa rekening sebagai berikut :

Nomor rekening : 0113.01.002826.30.4
Nama rekening : RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA
Bank : Bank Rakyat Indonesia KC. Pematang Siantar

Telah ditutup pada tanggal 27 Mei 2024 dengan saldo Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Soraya Rizna Afrijal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai laporan.



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Wilayah Medan
Telepon :
Facsimile :
Website : <http://www.bri.co.id>

Model 54

SANGAT SEGERA

Nomor : B.1369.e-KC/OPS/05/2024 27 Mei 2024
Lampiran : -
Perihal : Penutupan Rekening Pemerintah lainnya (RPL) Pihak Ketiga Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Di Tempat

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah berjalan baik selama ini, dan kepercayaan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Simalungun kepada Bank BRI Kantor Cabang Pematang Siantar untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada Pengadilan Negeri Simalungun.

Menindaklanjuti surat Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1117/PAN.PN.W2.U2/HK.2.4/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Penutupan Rekening Pemerintah lainnya (RPL) Pihak Ketiga, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No Rekening : 0113.01.002826.30.4
Nama Rekening : RPL 005 PDT PN Simalungun Untuk Biaya Perkara Lainnya
Jenis Rekening : Giro

Pada Bank BRI Cabang Pematang Siantar sejak tanggal **27 Mei 2024** telah kami lakukan penutupan rekening

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
SUB FUNGSI OPERASIONAL LAYANAN



SYAHLUN SIRAIT
ASISTEN MANAJER OPERASIONAL & LAYANAN

Tindasan

1. Arsip



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 460/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.3/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
NIP : 198112232009041004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara milik Pengadilan Negeri Simalungun pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan nomor rekening : 00069-01-30-000175-6, nama rekening : "RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA" untuk periode Juni 2024 senilai Rp1.467.118,00;
2. Seluruh Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) tersebut telah kami setorkan ke kas negara dan telah dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak terdapat lagi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk periode setelah Juni 2024.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun, 15 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ruben Harlen Panjaitan

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Transfer Keluar ke PN. Simalungun

Lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST)

Nomor :

Tanggal :

Pengiriman Buku Agenda Sidang Hakim, Buku-buku Pengadilan, Register-register Pengadilan dan
Perlengkapan Persidangan Lainnya

NO		NAMA BARANG	ALOKASI	HARGA SATUAN	TOTAL
2		Buku Jurnal Keuangan Perkara PT			
	1010301014	1. KII-A1			Rp -
		2. KII-A2			Rp -
		3. KII-A3			Rp -
3		Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan Buku Jurnal Keuangan PHI			
	1010301014	1. KI-A1/P	5 ✓	✓	Rp -
		2. KI-A1/G	4 ✓		Rp -
		3. KI-A2	4 ✓		Rp -
		4. KI-A3	4 ✓		Rp -
		5. KI-A4	4 ✓		Rp -
		6. KI-A5	4 ✓		Rp -
		7. PHI			Rp -
4		Buku Induk Keuangan Perkara PN			
	1010301014	1. KI-A7	4 ✓		Rp -
		2. KI-A8	4 ✓		Rp -
		3. KI-A9	4 ✓		Rp -
5		Buku Register Perdata PT dan PN			
	1010301014	1. Register Induk Perkara Perdata Gugatan PN	4 ✓		Rp -
		2. Register Induk Perkara Perdata Permohonan PN	5 ✓		Rp -
		3. Register Permohonan Perkara perdata Banding PN	1 ✓		Rp -
		4. Register Permohonan Perkara Perdata Kasasi PN	1 ✓		Rp -
		5. Register Penyitaan PN	1 ✓		Rp -
		6. Register Eksekusi PN	1 ✓		Rp -
		7. Register Permohonan PK Perkara Perdata PN	1 ✓		Rp -
		8. Register Induk Perdata PT			Rp -
6		Buku Register Pidana PT dan PN			
	1010301014	1. Register Induk Perkara Pidana PT			Rp -
		2. Register Penahanan PT			Rp -
		3. Register Induk Perkara Pidana Biasa PN	15 ✓		Rp -
		4. Register Induk Perkara Pidana Singkat PN	1 ✓		Rp -
		5. Register Induk Perkara Pidana Banding PN	2 ✓		Rp -
		6. Register Induk Perkara Pidana Kasasi PN	1 ✓		Rp -
		7. Register Grasi	1 ✓		Rp -
		8. Register Induk Perkara Pidana Cepat PN	1 ✓		Rp -
		9. Register Ijin / Persetujuan Penggeledahan PN	1 ✓		Rp -
		10. Register Ijin / Persetujuan Penyitaan PN	1 ✓		Rp -
		11. Register Tindak Pidana Ringan	1 ✓		Rp -
		12. Register Barang Bukti	2 ✓		Rp -
		13. Register Permohonan PK Perkara Pidana PN	1 ✓		Rp -
		14. Register Pra Peradilan	4 ✓		Rp -
		15. Register Penahanan PN	13 ✓		Rp -
7		Register Perkara Pidana Anak			
	1010301014	1. Register Induk Permohonan Banding Perkara Pidana Anak PT			Rp -
		2. Register Induk Perkara Pidana Biasa Anak	2 ✓		Rp -
		3. Register Induk Pidana Singkat Anak	2 ✓		Rp -
		4. Register Perkara Tindak Pidana Ringan Anak	1 ✓		Rp -
		5. Register Permohonan Banding Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -
		6. Register Permohonan Pidana Kasasi Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -
		7. Register Penahanan Anak	2 ✓		Rp -
		8. Register Permohonan PK Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -
		9. Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi	1 ✓		Rp -
		10. Register Kesepakatan Diversi	1 ✓		Rp -
		11. Register Permohonan Grasi Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -

8		Register Perkara Pidana Tipikor					
	1010301014	1.	Register Induk Perkara Tipikor				Rp
		2.	Register Permohonan Banding Tipikor				Rp
		3.	Register Permohonan Kasasi Tipikor				Rp
		4.	Register Permohonan PK Tipikor				Rp
		5.	Register Penahanan Tipikor				Rp
		6.	Register Penggeledahan Tipikor				Rp
		7.	Register Penyitaan Tipikor				Rp
		8.	Register Barang Bukti Tipikor				Rp
		9.	Register Permohonan Grasi Tipikor				Rp
		10.	Register Induk Tipikor Pengadilan Tinggi				Rp
9		Register Perkara Perdata Niaga					
	1010301014	1	Register Induk Kepailitan				Rp
		2	Register Umum Perkara Kepailitan				Rp
		3	Register Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan				Rp
		4	Register Permohonan PK Perkara Kepailitan				Rp
		5	Register Induk Perkara HAKI				Rp
		6	Register Permohonan Kasasi Perkara HAKI				Rp
		7	Register Permohonan PK Perkara HAKI				Rp
		8	Register Induk Perkara PKPU				Rp
		9	Register Permohonan Kasasi PKPU				Rp
		10	Register Permohonan Setelah Putusan PKPU				Rp
		11	Register Induk Perkara Gugatan Lain-Lain				Rp
		12	Register Permohonan Kasasi Gugatan Lain-Lain				Rp
		13	Register Permohonan PK Gugatan Lain-Lain				Rp
10		Register Perkara Hubungan Industrial					
	1010301014	1.	Register Induk Gugatan PHI				Rp
		2.	Register Eksekusi PHI				Rp
		3.	Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi				Rp
		4.	Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi				Rp
		5.	Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit				Rp
		6.	Register Penyitaan PHI				Rp
		7.	Register Pendaftaran Arbitrase				Rp
		8.	Register Permohonan Kasasi PHI				Rp
		9.	Register Permohonan PK PHI				Rp
		10.	Register Keuangan PHI				Rp
		BUKU KAS BANTU PN DAN PT					
		1	Buku Kas Bantu PT				
		2	Buku Kas Bantu PN	3	✓		
		SKUM					
		1	SKUM	2	✓		
11		Bendera Mahkamah Agung RI					
	1010307006	1	Bendera Mahkamah Agung RI	1	✓		Rp
12		PALU					
	1010307006	1	Palu	1			Rp
JUMLAH TOTAL					115		

PIHAK KEDUA
YANG MENERIMA

(Sbraya P. A
NIP. 199110032014032004

PIHAK PERTAMA
YANG MENYERAHKAN

T. JANSEN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 450/SEK.PN.W2-U16/KU1.4/VII/2024

Simalungun, 5 Juli 2024

Lampiran : 1 berkas

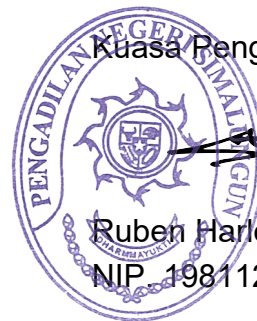
Hal : Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar
Jl. Rajamin Purba No. 119, Pematangsiantar

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotocopy SSBP beserta BPN/NTPN
2. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom
NIP. 198112232009041004

DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

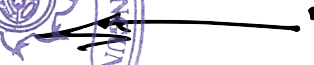
Perbaikan atas Dokumen :	☐ SSP	☒ SSBP	☐ STBS	☐ SSPBB
	☐ SSB	☐ SSPB	☐ SSCP	☐ SSPCP
Dokumen Nomor : 903C755DF9F16D9N	Tanggal Dokumen : 10 Juni 2024		Tanggal Setor : 12 Juni 2024	
Uraian Surat Setoran :	Bunga Rekening Pengadilan Negeri Simalungun			

Semula :

No	SEGMENT											Rp
	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Bank	Kewng	Lokasi	Anggaran	Antar entitas	
1	400370	005	425719	0000000	0000000	D0000000001	0000	0	0000	2	0000	1.467.118
JUMLAH												

Menjadi :

No	SEGMENT											Rp
	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Bank	Kewng	Lokasi	Anggaran	Antar entitas	
1	400371	005	425764	0000000	0000000	D0000000001	0000	0	0000	2	0000	1.467.118
JUMLAH												

Simalungun, 5 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
NIP.198112232009041004





BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240610145591
Tanggal Billing	: 10-06-2024 18:38:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 17-06-2024 18:38:06
Tanggal Bayar	: 12-06-2024 15:23:06
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK TABUNGAN NEGARA
Channel Bayar	: <i>Overbooking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEM. SIANTAR
Kementerian/Lembaga	: 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: 01 - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	: 400370 - PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Total Disetor	: 1.467.118 (IDR)
Terbilang	: <i>Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Belas (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 001960100143
NTPN	: 903C755DF9F16D9N

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Bunga Lainnya
Kode Akun	: 425719 - Pendapatan Bunga Lainnya
Jumlah Setoran	: 1.467.118 (IDR)
Keterangan	: Bunga Rekening Pengadilan Negeri Simalungun

KC / KCP / KK : _____

Tanggal : _____

FORMULIR PENYETORAN MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

Kode billing : _____

Nama : _____

Penyetor : ☐ Nasabah — No. rekening : _____Setoran : ☐ Tunai ☐ Debit rekening no. _____☐ Non Nasabah — No. rekening : _____☐ Warkat BTN No. _____ Nominal : _____

BANK BTN

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL DAN JAM BAYAR : 12/06/2024 15:23:06
TANGGAL BUKU : 13/06/24
KODE CABANG : 00069NTB : 001960100143
NTPN : 903C755DF9F16D9N
STAN : 554160

DATA SETORAN

KODE BILLING : 820240610145591
KEMENTERIAN/LEMBAGA : 005
NAMA WAJIB BAYAR : PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEM. SIANTAR
UNIT ESELON I : 01
SATUAN KERJA : 400370
JUMLAH SETORAN : 1,467,118.00 MATA UANG : IDRTERBILANG : # SATU JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU SERATUS DELAPAN
BELAS RUPIAH #THIS IS A COMPUTER GENERATED MESSAGE AND REQUIRES NO SIGNATURE
INFORMASI INI HASIL CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN00069 0019601 0004865 143 12/06/24 15:24:10 9114 1206.20.00069
189951000000 IDR 1,467,118.00 Dr

TELLER

PENYETOR

- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
- Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) $\geq$ Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi.
- Sesuai PBI No. 14/27/2012.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-378/KPN.0204/2024 8 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Satker Pengadilan Negeri Simalungun

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun

Menunjuk surat Saudara nomor 450/SEK.PN.W2-U16/KU.1.4/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara, dengan ini disampaikan bahwa perbaikan transaksi penerimaan negara tersebut telah dikoreksi sesuai dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 005/400371-01/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 (terlampir).

Sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Pematang Siantar, kami berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan dengan motto CETAR : Cepat, Transparan, dan Responsif.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi





NOTA PERBAIKAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : 005/400371-01/07/2024
Tanggal : 08-JUL-2024
Tahun Anggaran : 2024

KPPN : Pematang Siantar
Kode Satker : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	NTPN No.Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
1	903C755DF9F16D9N/1	28-JUN-2024	SSBP	IDR	400370.005.425719.0000000. 0000000.D000000001.M9031 .0.0000.2.000000.000000	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.Pendapatan Bunga Lainnya	1.467.118,00	400371.005.425764.0000000. 0000000.D000000001.M9031 .0.0000.2.000000.000000	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.467.118,00

Menyetujui
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi_
NIP.197007161996032001

Pematang Siantar , 8 Juli 2024

Kepala Seksi Bank



Ditandatangani secara elektronik
Tommy Hansen Panjaitan_
NIP.197205041999031001

